

Triwulan II Edisi ke-V

InAng Cestar

Informasi APBN yang **Cepat, Transparan, Responsif**

BERBAGI
KEBAIKAN,
UMKM Hadir Bagi
Masyarakat

**Pembangunan Zona
Integritas**

Menuju Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
KPPN Pematang Siantar

**Mengenal Lebih Jauh
Pencatatan dan Akuntansi
Hibah Uang**

DAMPAK PESTA DEMOKRASI PILPRES TAHUN 2024
TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Triwulan I | Edisi ke-V



SELAYANG PANDANG

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan edisi perdana Buletin Inang CETAR Edisi V Tahun 2024.

Buletin Inang Cetar Edisi-V kali ini memuat timeline kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang triwulan I tahun 2024 serta informasi realisasi APBN sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar. Selain itu edisi kali ini memuat artikel-artikel menarik seputar peran APBN dalam pelaksanaan pesta Demokrasi, pemberdayaan UMKM, pembangunan Zona Integritas serta serba-serbi Kota Pematang Siantar dan Kab. Simalungun.

Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Kota Pematangsiantar dan Kab. Simalungun, KPPN Pematangsiantar menyalurkan dana APBN untuk pembangunan daerah di kedua kabupaten/kota tersebut. Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, KPPN Pematangsiantar berkomitmen untuk terus bertransformasi memberi pelayanan prima dalam melayani stakeholder khususnya di kedua kabupaten wilayah kerja KPPN Pematangsiantar.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin tersebut, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca. Kiranya buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang menarik kepada stakeholder untuk mendukung keuangan daerah khususnya dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju!

Nova Juliana Sianturi

Kepala KPPN Pematangsiantar
Nova Juliana Sianturi





CONTRIBUTORS

Penanggungjawab

Nova Juliana Sianturi

Pemimpin Redaksi

Roland F.

Koordinator Penyusunan

BAB

Roland F.

Zulfan

Tommy Hansen Panjaitan

Yusuf Prihantoro

Surya Hadi



Chiltry

Kontributor



Anggiat

Kontributor



Imelda

Kontributor



Zulfan

Kontributor



Yusuf

Kontributor



Surya

Kontributor



Uli

Layout designer



Nelly

Layout designer



Louise

Layout designer



Indra

Editor



Armansyah

Editor



Angel

Copywriter



Juliani

Copywriter

DAFTAR ISI

1 **SELAYANG PANDANG**



2 **TIM REDAKSI**



5 **REALISASI APBN**
Periode Triwulan I 2024



6 **REALISASI TKD**
Periode Triwulan I 2024



8 **PEMBANGUNAN ZI 2024**
Zona Integritas WBBM KPPN
Pemaatangsiantar



9 **PENGAKUAN, PENCATATAN,
DAN PENGESAHAN HIBAH
LANGSUNG DALAM BENTUK
BARANG**

Mengenal lebih dekat akuntansi
Hibah Uang



13

RPD HALAMAN III, APAKAH PENTING?

mengulas pentingnya RPD Halaman III dari sisi keuangan negara



15

DAMPAK PESTA DEMOKRASI PILPRES TAHUN 2024 TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Serba-serbi APBN



18

BERBAGI KEBAIKAN, UMKM HADIR BAGI MASYARAKAT

Mendukung UMKM sebagai wujud *special mission*



20

SERBA-SERBI KOTA PEMATANGSIANTAR

Yuk mengenal lebih dekat kota pematangsiantar dan sejarahnya



22

TEKA TEKI SILANG

Ada hadiah menarik untuk yang mengirimkan jawaban yang benar



23

TIMELINE KEGIATAN

Kilas Balik kegiatan KPPN Pematangsiantar



REALISASI APBN

Periode Triwulan I 2024

Realisasi Belanja total pada KPPN Pematang Siantar sebesar Rp 957 Miliar dari keseluruhan pagu sebesar Rp 4,43 Triliun

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 110,1 M dari keseluruhan pagu sebesar Rp 372,8

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1,6 M dari keseluruhan pagu sebesar Rp 47,5 M

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 111,7 M dari keseluruhan pagu sebesar Rp 818,9

REALISASI TKD

Periode Triwulan I 2024

Total alokasi anggaran transfer ke daerah yang ada di KPPN Pematang Siantar adalah sebesar Rp Rp2.049.797.287.000 yang terdiri dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.049.797.287.000, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp43.255.370.000, Dana DAK Fisik sebesar Rp235.036.598.000, Dana DAK Non Fisik sebesar Rp250.402.747.000, Dana Desa sebesar Rp 332.974.670.000, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6.737.985.000

Realisasi DAU per Pemda s.d. Triwulan I 2024



Dana Alokasi Umum yang dialokasikan pada KPPN Pematang Siantar selaku Penyalur Dana Transfer Umum adalah sebesar Rp2.049.797.287.000 yang terdiri atas pagu DAU block grant sebesar Rp 1.519.399.662.000, dan pagu DAU specific grant sebesar Rp530.397.625.000

REALISASI TKD

Periode Triwulan I 2024

Total realisasi sampai dengan triwulan I TA 2024 adalah sebesar Rp 502.364.947.910 yang terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp495.654.560.750, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 5.791.387.160, serta Dana DAK Non Fisik sebesar Rp 919.000.000

Pagu DAK Fisik pada satker KPPN Pematang Siantar Penyalur Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp99.353.128.000 yang terdiri dari DAK Fisik dari Pemda Kabupaten Simalungun sebesar Rp216.876.342.000 dan DAK Fisik dari Pemda Kota Pematangsiantar sebesar Rp18.160.256.000

Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) pada satker KPPN Pematang Siantar Penyalur Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp43.255.370.000 yang terdiri dari DBH dari Pemda Kabupaten Simalungun sebesar Rp21.704.021.000 dan DBH dari Pemda Kota Pematangsiantar sebesar Rp21.551.349.000



Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Pematang Siantar

Oleh: Yusuf Prihantoro

Pembangunan zona integritas merupakan proses yang berkelanjutan, tidak hanya dilakukan pada periode tertentu tetapi terus berkesinambungan. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi. Birokrasi yang bersih dari korupsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. KPPN Pematang Siantar sebagai bagian dari instansi pemerintah juga terus menggiatkan pembangunan zona integritas. Meskipun sudah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Pematang Siantar terus berupaya menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan meningkatkan pelayanan bagi stakeholders.

Penyebarluasan nilai-nilai integritas dan antikorupsi terus diperdengarkan dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para stakeholders, antara lain dalam kegiatan press release, sosialisasi maupun bimbingan teknis. Tidak hanya bagi pihak eksternal, pihak internal KPPN Pematang Siantar juga terus diperkuat dalam menjaga integritas melalui kegiatan Sortali (Sharing Our Reaction and Talk About Integrity) serta rapat evaluasi kepatuhan internal dan kinerja.



Kegiatan Townhall Meeting



Kunjungan ke Kantor Walikota Pematangsiantar

PENGAKUAN, PENCATATAN, DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG

Oleh: Surya Hadi Purnama



Foto: antaranews.com

Selain dari belanja APBN, Pemerintah Pusat juga dapat memperoleh barang/aset tetap melalui donasi/hibah. Hibah dalam bentuk barang kepada Pemerintah Pusat dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Hibah aset kepada Pemerintah Pusat dapat berasal dari pemberi hibah dalam negeri maupun luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri dapat berasal dari a). lembaga keuangan dalam negeri, b). lembaga non keuangan dalam negeri, c). pemerintah daerah, c). perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, e). lembaga lainnya, dan f). perorangan. Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat berasal dari a). negara asing, b). lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, c). lembaga multilateral, d). lembaga keuangan asing, e). lembaga non keuangan asing, f). lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan g). perorangan.

Sesuai PSAP Nomor 7 PP Nomor 71 Tahun 2010 j.o. PMK Nomor 231/PMK.05/2022, Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Mengacu pada ketentuan itu, Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat digunakan sebagai dasar pengakuan aset tetap. Namun demikian, pencatatan aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak dapat dilakukan serta merta dengan mendasarkan pada perjanjian hibah dan BAST. Menteri Keuangan telah menetapkan pengaturan administrasi hibah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/202. Dalam beleid tersebut, diatur bahwa pencatatan aset tetap yang bersumber dari Hibah, dilaksanakan melalui pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Pengesahan dimaksud dilakukan melalui mekanisme Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Beban/Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

Registrasi dan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat berharga

Dalam rangka pencatatan aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (MPHL-BJS) dan pengesahan pendapatan hibah dengan menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk barang/jasa/surat berharga (SP3HL-BJS). Penyampaian SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN untuk mendapatkan pengesahan, dilampiri a.) surat penetapan nomor register Hibah, b.) BAST, dan c.) Surat PernyataanTelah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL). Penerbitan Nomor Register Hibah luar negeri ditetapkan oleh DJPPR. Sedangkan penerbitan Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari luar negeri kepada DJPPR dan atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permohonan nomor register hibah dimaksud dilampiri a.) perjanjian Hibah, b.) ringkasan Hibah, dan c.) dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.



Dalam hal tidak terdapat dokumen tersebut, permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dilampiri dengan SPTMHL.

Kebijakan Akuntansi Transaksi Perolehan Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung

Pada saat proses register hibah langsung dalam bentuk barang, tidak ada pencatatan akuntansi. Apabila nomor register hibah telah terbit tetapi satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) penerima hibah belum melakukan proses serah terima hibah langsung barang dan/atau proses pengesahan hibah langsung bentuk barang sampai dengan tanggal laporan keuangan, maka atas hal tersebut perlu dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan atas hibah yang belum dilaksanakan/disahkan tersebut paling sedikit memuat ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.

Pada saat serah terima hibah langsung bentuk barang, UAKPA penerima hibah mengakui hibah langsung barang berupa aset tetap dan diukur sebesar nilai yang dicantumkan dalam berita acara serah terima barang atau dokumen yang dipersamakan. Pada saat yang sama, menyajikan hibah langsung yang belum disahkan berupa kewajiban jangka pendek dengan nilai yang sama, sebagai akun



Foto: stessa.com

antara yang akan terselesaikan pada saat telah melakukan proses pengesahan hibah. Dalam hal BAST atau dokumen yang dipersamakan tidak menyertakan nilai hibah, UAKPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar berdasarkan referensi pasar aktif, referensi aset sejenis, referensi otoritas sektor atau referensi penilai pemerintah. Dalam hal barang hibah yang diterima memiliki keunikan dan kekhususan sehingga tidak dapat diperoleh estimasi nilai wajar, UAKPA penerima hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai jumlah unit atau kuantitas aset, ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.



Foto: altonivel.com.mx

Pada saat pengesahan hibah langsung bentuk barang, UAKPA penerima hibah, sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS yang telah diproses oleh KPA penerima hibah, mencatat dan menyajikan Nilai hibah langsung barang berupa aset tetap sesuai klasifikasinya. Kebijakan akuntansi pengakuan untuk perolehan aset tetap tersebut mengikuti ketentuan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat. Pendapatan Hibah langsung bentuk barang sebagaimana disertakan di kolom pendapatan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS merupakan Pendapatan Hibah yang akuntansinya dilaksanakan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah. Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajian hibah langsung berupa barang dan/atau surat berharga yang mudah dikonversi menjadi uang tunai sejak dari awal perolehan tidak diniatkan untuk dikonversi ke uang tunai dan dibelanjakan, mengikuti transaksi pengesahan hibah langsung bentuk barang dan jasa.

Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Barang Tahun Anggaran yang Lalu

Apabila pengesahan hibah langsung bentuk barang dilakukan setelah melewati tahun pelaksanaan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka KPA penerima hibah melakukan proses pengesahan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran yang lalu (TAYL). Kondisi ini tidak semerta-merta menghilangkan kepatuhan terhadap ketentuan proses bisnis pertanggungjawaban pengesahan hibah langsung bentuk barang.

Berdasarkan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL yang telah diproses oleh KPA penerima hibah, UAKPA mencatat dan menyajikan Nilai hibah langsung barang berupa aset tetap sesuai klasifikasinya. Dalam hal hibah langsung bentuk barang berupa aset tetap memiliki keunikan dan kekhususan sehingga tidak dapat diperoleh estimasi nilai wajar, UAKPA penerima hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai jumlah unit atau kuantitas aset, ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.

Transaksi pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang TAYL sebagaimana yang disertakan di MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL merupakan penyesuaian tambah nilai ekuitas. Proses pencatatan akuntansinya dilaksanakan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada DJPPR.



Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA, apakah penting?

Oleh: Chiltry Hutahaean

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, menunjuk Deviasi Halaman III DIPA menjadi salah satu indikator kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran. Indikator tersebut mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja yang disusun oleh satker. Rencana penarikan dana bulanan adalah yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan, yaitu paling lambat hari kerja kesepuluh pada bulan Februari, April, Juli dan Oktober untuk masing-masing triwulan.

Sesuai dengan tujuannya, indikator deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur ketepatan antara realisasi dengan rencana per jenis belanja yang disusun oleh satker.

Dari hasil penilaian indikator Deviasi Halaman III DIPA per Maret 2024 satker mitra kerja KPPN Pematang Siantar, hanya 40 dari 54 satker yang memperoleh nilai 100 (74%), meningkat dibandingkan Maret 2023 yang hanya sebesar 47%. Nilai tersebut meningkat dikarenakan terdapat dispensasi RPD untuk belanja pegawai dan barang di bulan Maret 2024, dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024. Dari hasil tahun 2023, hanya 22.6% satker yang memperoleh nilai 100, dengan kata lain hanya 22.6% satker yang dapat merencanakan dan merealisasikan anggaran dengan tepat.

Rencana Penarikan Dana (RPD) digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran yang sesuai dengan RPD yang disusun menunjukkan bahwa satker dapat menyusun rencana dengan baik serta melaksanakan realisasi anggaran dalam penyelesaian kegiatan dimaksud. Dengan adanya RKA K/L yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dan telah diteruskan ke seluruh satker, maka seharusnya seluruh satker dapat merencanakan kegiatan dengan baik dan didukung oleh anggaran yang tersedia.





Di lain sisi, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan selaku pengelola kas negara memiliki tugas untuk memastikan ketersediaan kas. Ketersediaan kas tersebut pastinya memerlukan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas yang disusun secara top-down maupun bottom-up. RPD Halaman III DIPA semestinya dapat digunakan sebagai proyeksi pengeluaran kas secara bottom-up. Tetapi ketidakakuratan RPD Halaman III DIPA sebagai dasar realisasi anggaran mengakibatkan perencanaan kas pemerintah tidak menggunakan RPD Halaman III DIPA secara tepat untuk mengukur proyeksi pengeluaran kas pemerintah.

Jadi apakah RPD Halaman III DIPA penting? Pastinya penting sebagai dasar satker untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai target-target output yang telah ditetapkan. RPD Halaman III DIPA seharusnya dapat digunakan untuk menentukan proyeksi pengeluaran kas secara bottom-up. Tetapi sebelum RPD Halaman III DIPA digunakan sebagai dasar proyeksi pengeluaran kas, maka perlu dipastikan kembali bahwa seluruh satker, selaku pengguna anggaran, memahami serta mematuhi RPD yang telah disusun pada Halaman III DIPA. Penggunaan RPD Halaman III DIPA sebagai proyeksi pengeluaran kas pastinya memerlukan analisis yang lebih mendalam, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perencanaan kas yang dilakukan oleh seluruh satker K/L adalah penyusunan RPD Halaman III DIPA.



Foto: detik.com

Dampak Pesta Demokrasi Pilpres Tahun 2024 Terhadap Perekonomian Nasional

Oleh: Zulfan

Pesta Demokrasi Pilpres yang dilaksanakan sekitar tiga bulan yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 telah usai sudah dan kita patut bersyukur bahwa dalam masa kampanye dan pelaksanaan Pemilu tersebut secara keseluruhan telah berlangsung dengan tertib dan aman. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan secara resmi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang menetapkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, meskipun terdapat gugatan hasil pemilu tersebut dari ke 2 pasangan lainnya.

Untuk penyelenggaraan kegiatan pesta demokrasi tersebut, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran belanja Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun dimana alokasi tersebut mengalami kenaikan sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun. Alokasi dana dari APBN tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, dan konsumsi rumah tangga. Terdapat alasan kuat yang melatarbelakangi kenaikan cukup signifikan tersebut karena alokasi anggaran Pemilu



Foto: presidenri.go.id



Foto: Pemilu 1999, kompas.id

merupakan investasi dari tatanan kehidupan berpolitik dan demokrasi di Indonesia, sehingga keberhasilan Pemilu 2024 ini diharapkan akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate serta stabilitas politik ini tentu menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor.

Dari sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selama ini mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena penyelenggaraan Pemilu itu sendiri menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sosial dan politik, juga sektor ekonomi. Pemilu akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan, pelaksanaan anggaran Pemilu mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08 – 0,11%.

Adapun dampak langsung Pemilu terjadi melalui peningkatan belanja negara dalam APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu, dampak tidak langsung terjadi melalui tambahan pendapatan masyarakat dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) sebagai akibat dari kegiatan kampanye dan pelaksanaan Pemilu.

Secara keseluruhan terdapat beberapa dampak positif kegiatan Pemilu terhadap perekonomian nasional, yaitu:

- Sektor produksi dan distribusi kian bergairah karena adanya kebutuhan pengadaan logistik, serta barang dan jasa. Daya beli masyarakat juga naik seiring dengan adanya belanja dan konsumsi dari tingkat pusat sampai dengan Badan Adhoc yang menerima honor Pemilu.



Selain itu, kegiatan kampanye dari para peserta Pemilu juga turut memutar roda ekonomi masyarakat.

- Aktivitas produksi seperti penyediaan atribut dan pengumpulan massa selama kampanye, di saat yang sama akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk makanan-minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akomodasi, serta industri transportasi. Aktivitas tersebut tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan komponen konsumsi masyarakat dalam PDB.
- Momentum Pemilu juga terbukti mampu memberikan stimulus tambahan terhadap pendapatan nasional, bahkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Jika kita melihat ke belakang, meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan komponen selama momen Pemilu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari base line-nya.

- Pelaksanaan pesta demokrasi yang baik dan situasi yang kondusif akan mendorong kepercayaan pelaku usaha dan investor untuk tetap melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih terjamin.

Akhirnya, kita semua tentunya berharap bahwa pemerintahan yang nantinya terbentuk dari hasil Pemilu 2024 diharapkan mampu melanjutkan strategi pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, reformasi dan hilirisasi sektor industri perlu terus diperkuat, dukungan tenaga kerja yang memadai, SDM yang berkualitas, serta regulasi-regulasi yang menunjang produktivitas perlu terus dilaksanakan. Keberlanjutan penguatan pasar keuangan domestik juga perlu terus dijaga untuk menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Berbagi Kebaikan, UMKM Hadir Bagi Masyarakat

Oleh: Imelda Damanik

Bulan Suci Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi pemeluk agama Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia. Pada bulan ini, Umat Islam menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Bulan ini merupakan bulan yang penuh kebahagiaan dan kebaikan.



Di bulan penuh berkah ini, kami, KPPN Pematangsiantar, ikut mengambil bagian dalam gerakan kebaikan bagi UMKM dan masyarakat di sekitar kami. Kami memberikan 100 paket takjil gratis bagi masyarakat sekitar yang melalui Jalan Radjamin Purba (depan KPPN Pematangsiantar), mulai dari masyarakat dengan kendaraan umum (angkot), driver ojek online, pejalan kaki, hingga pengendara sepeda motor. Pembagian takjil ini merupakan kerelaan hati seluruh pegawai untuk berbagi dengan sesama.

100 paket takjil yang kami bagikan merupakan produk dari usaha rumahan Masakan Rumah Umma, UMKM yang berlokasi di sebelah KPPN Pematangsiantar. Sebagai makhluk sosial, kami sadar bahwa kami memerlukan orang lain. Atas dasar kesadaran ini, kami melakukan bakti sosial dengan melibatkan UMKM yang ada di dekat kami, juga sebagai langkah menjaga kerukunan bertetangga. Sebagai Insan Perbendaharaan, kami juga sadar bahwa kami menjadi wajah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan wajah Kementerian Keuangan yang secara nyata dilihat oleh lingkungan sekitar. Kami tentu terbebani menjadi role model bagi masyarakat. Mendorong UMKM maju dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.



Kami berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, baik sebagai organisasi maupun sebagai individu. Tidak hanya ketika Bulan Ramadhan, tetapi di semua kesempatan. Seperti sebuah kutipan “sebuah tujuan besar berawal dari langkah kecil yang berani”, demikianlah langkah kecil yang kami mulai dengan berani.



Sebuah kebaikan sederhana yang akan terus kami lakukan dan kembangkan untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan dan kedamaian bersama.



Serba-serbi Kota Pematangsiantar

Oleh: Anggiat Tambunan

Halo, Sobat Intress, pada edisi buletin Inang Cetar sebelumnya, kita telah banyak membahas terkait objek wisata yang ada pada Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Nah, pada edisi kali ini, kita akan membahas terkait fakta unik dan menarik yang ada pada kota Pematangsiantar.

Sebagai salah satu kota tertua di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar memiliki fakta menarik dan unik yang mungkin banyak orang tidak ketahui, dikutip dari beberapa sumber, berikut beberapa fakta unik dan menarik terkait kota Pematangsiantar.

Asal usul nama kota Pematang Siantar



Pematang Siantar terdiri dari dua suku kata yaitu "Pematang" dan "Siantar", kata "Siantar" dahulu disebut "Siattar" berasal dari nama sebidang tanah di "attaran" di Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun "attar" ditambah akhiran "an" yang artinya menunjuk pada sebuah wilayah (areal tanah). Seiring berjalannya waktu, akhiran ini berubah menjadi awalan "si" yang dalam bahasa Simalungun dipakai untuk kata tempat dan benda. Sedangkan kata "Pematang" memiliki arti perhutaan atau perkampungan. Nama ini berasal dari tempat tinggal raja yang pernah berkuasa di Siantar, yaitu Rumah Bolon atau Huta. Ide untuk menamai tempat tinggal raja ini dengan "Pematang" akhirnya membentuk nama "Pematang Siantar," yang secara harfiah berarti "Istana Raja Siattar."

Tempat Kelahiran Wakil Presiden Ke-3 RI

H. Adam Malik Batubara, wakil presiden Republik Indonesia ke-3, lahir pada 22 Juli 1917 di Pematang Siantar. Ia merupakan seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden pada 1978 sampai 1983. Sebelumnya, ia pernah



menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, dan presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adam Malik meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984, pada usia 67 tahun. Ia dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 1998.

Becak Siantar

Pada buletin inang cetar edisi pertama, kita telah membahas mengenai Tugu Becak Siantar, salah satu ikon yang ada di Kota Pematang Siantar. Becak Siantar memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan becak yang ada di daerah lain, hal ini dapat dilihat dari jenis sepeda motor yang digunakan yaitu sepeda motor merek BSA atau Birmingham Small Arm, motor besar tua bermesin 350 cc hingga 500 cc yang sangat langka di dunia. Becak motor ini merupakan kendaraan perang militer Inggris dan tentara sekutu melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Kemudian BSA masuk ke Indonesia khususnya kota Pematang Siantar.



Roti Legendaris

Tidak lengkap rasanya ke kota Siantar jika tidak membeli oleh-oleh Roti Ganda yang merupakan roti legendaris di Kota Siantar. Sebutan Roti Ganda berasal dari nama usaha roti yang sudah buka sejak 1979 dan sudah bertahan hingga empat generasi di Pematang Siantar. Toko Roti Ganda mempunyai dua toko, yang pertama di jalan. Sutomo dan yang kedua di jalan Kartini. Banyak pilihan roti yang bisa dibeli dan wajib untuk dicoba jika datang ke Kota Pematang Siantar.

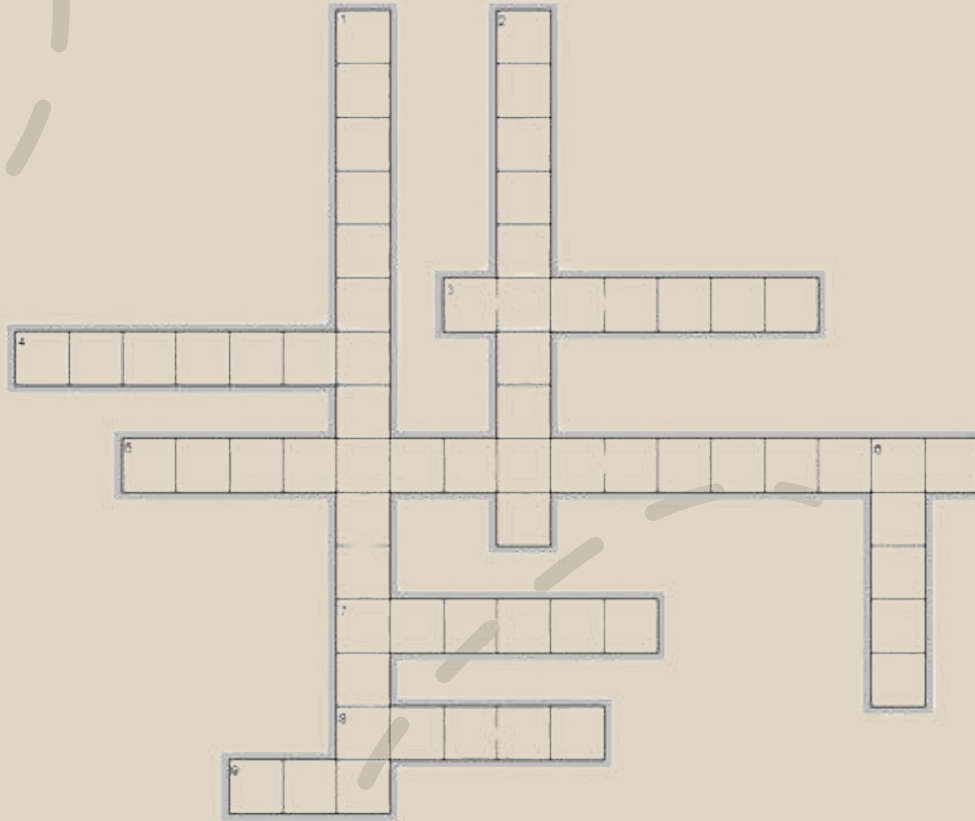
Patung Dewi Kwan Im Tertinggi se-Asia Tenggara

Patung Dewi Kwan Im menjadi salah satu ikon wisata religi yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan di Siantar. Patung ini berdiri sejak November 2005 dan berada di Kompleks Vihara Avalokitesvara di Jalan Pane, Kecamatan Siantar Selatan. Patung Dewi Kwan Im memiliki tinggi 22,8 meter dan berat sekitar 1.500 ton. Dengan ketinggiannya itu, patung tersebut meraih rekor MURI pada 2008 sebagai patung Dewi Kwan Im tertinggi di Asia Tenggara.

Demikianlah sobat intress beberapa fakta unik dan menarik yang ada di Kota Pematang Siantar, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menarik untuk kita bahas pada edisi inang cetar mendatang. Sampai jumpa lagi pada edisi inang cetar berikutnya. Terima kasih.



teka teki silang



Across

3. Himpunan Bank Milik Negara
4. Hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis
5. Seorang tenaga profesional yang memberikan nasihat dan solusi terhadap perencanaan serta permasalahan keuangan
7. Melakukan manajemen risiko atas pelaksanaan tugas SO KPPN
8. Batas akhir lapor SPT OP
9. Regional Chief Economist

Down

1. Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab
2. Uang yang masuk ke dalam kas
6. Melaksanakan tugas KPPN di bidang layanan operasional perbendaharaan



Caranya?

1. follow IG @kppn.pematangsiantar
2. Kirim jawaban kamu melalui Direct Message (DM) ke @kppn.pematangsiantar
3. jawaban dapat berupa gambar/tangkapan layar/tulisan
4. 3 (tiga) peserta tercepat dan tepat akan mendapatkan hadiah menarik
5. pemenang akan diumumkan pada edisi berikutnya
6. TTS tidak dipungut biaya apa pun

kilas balik!

✧ **JANUARI** ✧
✧ **2024** ✧



Bimtek Implementasi NPWP 16 Digit

Dison Tabo



Hari Bakti Perbendaharaan

kilas balik

✦ **JANUARI** ✦
✦ **2024** ✦



***Perayaan Natal Kemenkeu
Satu Kota pematang Siantar***

***Bakti Sosial
Kemenkeu Satu Kota
Pematang Siantar***



***FGD Dak Fisik dan Dana
Desa***

kilas balik

✦ ✦
JANUARI
2024



***Asistensi Rekonsiliasi
dan Data Monsakti
Penyusunan LK***

***Penandatanganan
Pakta Integritas dan
Netralitas Pegawai***



***Refreshment
CMS***

Timeline February 2024



29 FEBRUARI 2024
High Level Meeting TPID Kota Pematangsiantar



29 FEBRUARI 2024
Sosialisasi Penyusunan LPJ Bendahara melalui aplikasi SAKTI



28 FEBRUARI 2024
Penandatanganan BAR bersama BPKAD Simalungun



22 FEBRUARI 2024
PRESS RELEASE APBN, APRESIASI, SOSIALISASI ANTIKORUPSI & UMKM

Timeline" February 2024



22 FEBRUARI 2024
FGD Data Analytics bersama
BPS SIMALUNGUN



16 FEBRUARI 2024
Olahraga Jalan Sehat Bersama



15 FEBRUARI 2024
Koordinasi Rakorwil bersama Korem 022/Pantai
Timur



15 FEBRUARI 2024
Kegiatan Sortali Bulan Februari 2024

kilas balik

M A R E T
2 0 2 4



***Kunjungan ke Kantor
Walikota Pematangsiantar***

***KPPN Pematang
Siantar Berbagi***



***Acara Buka Bersama di
KOREM-022/PT DAM-1/BB***



kilas balik

M A R E T
2 0 2 4



***Triwulan I
Service Excellent***



***Triwulan I
Capacity Building***



***MARSITANDAAN
Triwulan I***

kilas balik!

M A R E T
2 0 2 4



Review SOP



Gugus Kendali Mutu



Sortali (Sharing Our Reaction and Talking about Integrity)

Triwulan II | Edisi ke-V

InAang Cestar

Informasi APBN yang **Cepat, Transparan, Responsif**

